



The Republic of West Papua

The National Government

Retouradres:
Thomas Schwenckestraat 30,
2563 BZ Den Haag

Kepada jth:
Bapak2 dan Ibu dari kelompok kesatuan
gerakan pembebasan (ULMWP) di Den Haag

E-mail: ulmwp.nl@gmail.com

No. Referentie
PHP/MLN/ 2015. TB.001

Bijlage
Bukti pernyataan Deklarasi
Perdamaian Papua

Datum
9 januari 2015

Onderwerp
Tanggapan terbuka atas undangan tt. 6 januari 2015

Bapak2 Octovianus Mote, Benny Wenda, Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Ibu Leoni Tanggahma,

Disini saja menulis satu tanggapan terbuka mendjawab undangan bapak2 dan ibu tt. 6 januari 2015.

Balasan ini mendjawab bahwa undangan tersebut saja tidak penuh untuk menghadiri maksud pertemuan sosialisasi, jang berasaskan prinsip politik, sebagai-berikut:

Latar belakang politik.

Mengingat, bahwasanja,
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (Gerakan Nasional Papua Barat bagi Kemerdekaan) adalah satu2nja pajung organisasi – Piagaam OPM.

Mengetahui, pula,
Rakjat Papua Barat dan Pedjoang-Pedjoang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM, bertekad, untuk menjelamatkan kelangsungan hidup Ras Melanesia di bagian Barat dari pulau raja Papua terhadap pemusnahan jang dilakukan oleh Indonesia, baik langsung dengan pembunuhan-pembunuhan massal dan sistimatis, maupun dengan paksaan asimilasi dan keluarga berentjana, serta penjebaran bakteri (tjantjing-pita, syphilis, hiv/aids dan sebagainya), dan, untuk mempertahankan identitas ras dan nilai-nilai budaja Melanesia terhadap kesatuan identitas dan kebudajaan buatan Indonesia, “ Bhineka Tunggal Ika”, dan, untuk mendjundjung tinggi rasa harga diri sebagai satu rakjat diatas negeri kami jang indah dan kaja, terhadap perkosaan hak-waris dan pendjualan negeri dan Rakjat kami kepada Indonesia jang direstui oleh PBB pada tanggal 19 november 1969 dengan resolusinja, UN-GA No. 2504 (XXIV) november, 19. 1969.

maka dengan tjita-tjita tersebut diatas Rakjat Papua Barat dan Pedjoang-Pedjoang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM memutuskan, untuk tidak takluk kepada hasil Penentuan Pendapat Rakjat 1969 karangan Indonesia, jang adalah terbesar dalam sedjarah kemanusiaan dan jang bertentangan kenjataan sebenarnja, dan, untuk memperdjoangkan kemerdekaan kebangsaan tak bersjarat bagi negeri Rakjat Papua Barat dan Pedjoang-Pedjoang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM, sebagai terkandung dalam peristiwa, 1 desember 1961, jang mendjiwai dan mendasari Proklamasi Kemerdekaan Sepihak, 1 juli 1971, maka dengan ini Rakjat Papua Barat dan Pedjoang-Pedjoang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM membentuk Organisasi Perdjoangan Nasional dan menjusun TATA-ATURAN DASAR bagi organisasi jang dimaksudkan.:

Dalam kerangka semangat “Tekad 15 Juli 1970 ” dari Front / Komando Pembebasan Papua Barat Angkatan ’69, sebagaimana pula termaksud dalam Program Revolusi Rakjat Papua Barat, maka untuk melakukan satu gerakan rakjat semesta nasional jang sempurna, di Markas Victoria dibentuk setjara tunggal “satu Badan Perdjoangan Nasional”.

Badan Perdjoangan Nasional jang Tunggal ini mengalami perubahan nama dan struktur Organisasi, sedjak “Tekad 15 Juli 1970” ditjetuskan di Markas Victoria, sebagai termuat pada Art. 2, Piagam OPM. Nama organisasi adalah “Organisasi Papua Merdeka”, jang selanjutnja disingkat “OPM”.

Pengunaan nama OPM diluar dari keanggotaan adalah tidak sah. Setiap perobahan atau tambahan apapun dalih jang dipakai untuk membenarkan penggunaan lain, adalah tidak sah dan usaha kontra revolusi. Sesuai Art. 71 ayat (1) penggunaan nama organisasi baru asal OPM adalah tidak sah.

OPM adalah wadah nasional dari tiga partai politik nasional jang berdjoang bagi tertjapainja Negara Papua Barat jang merdeka dan berdaulat.

Sesuai ketentuan ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) huruf (a) dan Tudjuan OPM Art. 4, maka OPM bukan satu partai politik atau oragnasasi jang menganut aliran politik tertentu.

Sesuai ketentuan ayat (3) huruf (a), maka semua organisasi gerakan perlawanan jang berdjoang dalam kerangka “Tjita-tjita Papua Barat Merdeka”, OPM adalah pula wadah kesatuan nasional gerakan-gerakan kemerdekaan sedjak 15 Juli 1970.

Setiap organisasi gerakan perlawanan atau organisasi massa jang bertjita-tjita Papua Barat Merdeka, OPM adalah organisasi mereka.

Sesuai Program Revolusi Rakjat Papua Barat dan “Tekad 15 Juli 1970” dan ketentuan-ketentuan ayat-ayat (1) – (3), maka OPM adalah “Wakil” dan “Suara” dari rakjat Papua Barat jang sedang berdjoang. Penggunaan “Wakil” dan “Suara” diluar dari OPM adalah usaha kontra revolusi.

Dari penulisan diatas saja pun mencritisiri disini kepada setiap pihak jang sudah pada awalnja merantjangkan niat2 tersebut sampai dibentuknja satu wadah perdjoangan baru di Port Vila, Vanuatu, dengan etiket Unite Movement for West Papua (ULMWP).

Sesuai sumber terpertjaja bahwa setjara terbatas, jaitu ditahun 2013 dan atau 2014 dilakukan pertemuan sepihak di Negara China, dilibatkan Bapak2 Octovianus Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, John Ondowame (almarhum) dan Ibu Leoni Tanggahma. Setelah itu dilangsungkan lagi ke Geneva ditahun 2014, dimana dilibatkan Ibu Nancy Jouwe atas undangan dari Bapak Octovianus Mote. Hal itu membuat pertentangan intern dan djelas tidak ada kepuasan didalam team tersebut. Sumber menambahkan bahwa maksud2 ini adalah dukungan dari Bapak Neles Tebay, Djaringan Damai Papua (Papua Peace Network) dan Pemerintah Indoneia di Papua, Indonesia. Dimana realitas ini tidak keluar dari pelutjuran pernjjataan dari Deklarasi Perdamaian Papua di Jayapura, 5-7 Juli 2011. Ditetapkan sah kepada Bapak2 Octovianus Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, John Ondoweme (almarhum), Ibu Leoni Tanggahma, mereka selaku Para Djuru-bitjara/Djuru-runding.

Pernyataan Deklarasi Perdamaian Papua adalah sah sebab dimaklumkan kepada seluruh rakyat Papua, Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang peduli dengan upaya pihak-pihak tertentu tersebut mewujudkan perdamaian di Papua, dengan menghiraukan/contra politik terhadap makna dari "Piagam OPM".

Selaku pelaksana tugas harian dari Presiden Amos F. Iney dan Menteri Luar Negeri untuk The National Government of the Republic of West Papua di Den Haag, Negeri Belanda, memohonkan kepada perhatian dan serta sekaligus kewaspadaan bagi Rakyat Papua Barat dan Pedjuang-Pedjuang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM, dimana,

Sebelum memastikan pilihannya dan berpikir yang baik dengan penuh bidjaksanaan. ULMWP, saya sangka adalah masker politik saja yang menutup dan atau melidungi isi dari pernyataan Deklarasi Perdamaian Papua. Mengapa sehingga Bapak Octovianus Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, Jacob Rumbiak (yang mengisi tempat dari John Ondowame), dan Ibu Leoni Tanggahma. Dan atau mengapa pertemuan di Vanuatu, hanya begitu dichususkan kepada hanya 3 kelompok aktivitas, yaitu 2 datang dari Papua, Indonesia dan 1 dari/di Vanuatu ?. Manakah Tata-Aturan organisasi yang pada awalnya ada mengikat ke 3 kelompok aktivis, yakni: NRFPB, WPNCCL dan PNWP (FWPC/KNPB)?.

Baru ini ternyata diedarkan melalui sosial-media satu pernyataan tertulis dari Ketua NFPB di Papua, Indonesia, yang mana disampaikan terbuka pembantaan terhadap hasil terbentuknya ULMWP. Ini membuktikan public adanya krisis relasi politik diantara ke 3 kelompok aktivis.

Dengan alasan latar-belakang diatas dan hasil perkembangan yang saya ikuti setjara seksama itu, membatasi diri saja dan apalagi tugas dan tanggung-djawab saja dewasa ini didalam The National Government of the Republic of West Papua, dan apalagi saja lihat tentu tidak akan ada tanggung-djawab, sesuai laporan dari Perwakilan Luar Negeri Pemerintah Vanuatu kepada perhatian saja dan delegasi dan inklusif Wakil UNPO moderator Republic of West Papua melalui pertemuan khusus dengan Dubes Republic of Vanuatu pada tanggal 23 september 2014 di Brussels, Belgium.

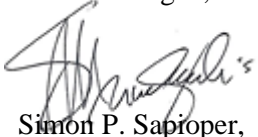
Dari undangan Bapak dan Ibu tersebut, dimana tidak ada bukti lampiran document tertulis sebagai gambaran yang merupakan tindak lanjut dari permintaan pimpinan Bangsa-Bangsa Melanesia dalam rapat khusus di Port Moresby, Papua New Guinea, tidak dilampirkan.

Saya tidak bersedia hadir dan tidak mau/perlu mendengar penipuan dan kemudian saja bukan penjangkung lida untuk menipu kepada Rakyat Papua Barat dan Pedjuang-Pedjuang Kemerdekaan dalam Organisasi Papua Merdeka / OPM.

Demikian djawaban saja untuk diketahui dan saya pun selalu bersedia melihat dan atau mendengar tanggapan balik Bapak dan Ibu ataupun pihak publik sesuai norma yang mereka anutkan.

The National Government of the Republic of West Papua

Tertanda-tangan,



Simon P. Sapioper,

Pedjabat Harian Tugas Presiden Amos F. Iney dan Menteri Luar Negeri.